

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di lapangan, berikut kesimpulan terhadap implementasi kebijakan perluasan kesempatan kerja di Kabupaten Karawang:

1. Berdasarkan Hasil penelitian terkait implementasi kebijakan perluasan kesempatan kerja di Kabupaten Karawang melalui empat aspek yaitu arah kebijakan, pelaksana kebijakan, bentuk kegiatan, dan pelaporan pelaksanaan yang mengacu pada Peraturan Bupati Karawang Nomor 8 Tahun 2016 sudah berjalan dengan baik. Dari sisi arah kebijakan, program ini dinilai sudah sesuai dengan kondisi Kabupaten Karawang sebagai daerah industri yang memiliki jumlah perusahaan dan pencari kerja yang cukup tinggi. Kebijakan ini berupaya menjembatani kebutuhan tenaga kerja dari perusahaan dengan masyarakat pencari kerja melalui berbagai program seperti penyediaan informasi lowongan kerja dan pelayanan ketenagakerjaan yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Dari sisi pelaksana dan bentuk kegiatan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Karawang dinilai telah cukup siap dalam menjalankan kebijakan tersebut, baik dari segi kompetensi pegawai maupun pelayanan kepada masyarakat. Pelaksanaan kebijakan juga didukung oleh

sistem informasi lowongan kerja berbasis online serta kewajiban perusahaan untuk memprioritaskan tenaga kerja lokal. Selain itu, pelaksanaan program juga disertai dengan mekanisme pelaporan dari perusahaan kepada dinas sebagai bahan monitoring dan evaluasi. Meskipun demikian, dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala, seperti belum meratanya pemenuhan tenaga kerja lokal di seluruh perusahaan serta ketepatan waktu pelaporan yang belum sepenuhnya konsisten.

2. Berdasarkan Hasil penelitian terkait Faktor pendukung & penghambat implementasi kebijakan perluasan kesempatan kerja di Kabupaten Karawang dapat dilihat dari beberapa aspek. Faktor pendukung tersebut terlihat dari adanya keselarasan kepentingan pemerintah daerah dengan tujuan kebijakan untuk menurunkan tingkat pengangguran dan meningkatkan kesempatan kerja bagi masyarakat lokal. Selain itu, kebijakan ini juga memberikan manfaat yang cukup nyata, baik dari sisi penurunan angka pengangguran maupun kemudahan masyarakat dalam mengakses informasi lowongan kerja melalui sistem digital. Dukungan lain juga terlihat dari peran aparat pelaksana yang telah memiliki pembagian tugas yang jelas, tingkat kedisiplinan yang baik, serta pelayanan yang relatif berjalan tertib sehingga dapat menunjang pelaksanaan program.

Namun demikian, dalam implementasinya masih terdapat beberapa faktor yang menjadi penghambat. Salah satunya berkaitan dengan aspek budaya masyarakat, khususnya dalam proses adaptasi terhadap sistem layanan yang telah berbasis digital. Tidak semua masyarakat memiliki

tingkat pemahaman teknologi yang sama, terutama bagi kelompok usia yang lebih tua sehingga masih memerlukan pendampingan dalam mengakses layanan. Selain itu, meskipun dari sisi internal anggaran dinilai cukup dan tidak menjadi kendala utama, tetap diperlukan upaya peningkatan sosialisasi serta penguatan pelaksanaan kebijakan di lapangan agar manfaat program dapat dirasakan secara lebih merata oleh seluruh masyarakat Kabupaten Karawang.

4.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi kebijakan perluasan kesempatan kerja di Kabupaten Karawang, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan sebagai bahan perbaikan dalam pelaksanaan kebijakan ke depan:

A. Saran untuk Implementasi Kebijakan Perluasan Kesempatan Kerja di Kabupaten Karawang

1. Pemerintah daerah, khususnya Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Karawang, diharapkan dapat meningkatkan pengawasan terhadap perusahaan agar kebijakan yang memprioritaskan tenaga kerja lokal dapat benar-benar diterapkan secara maksimal di lapangan. Hal ini penting agar tujuan kebijakan dalam mengurangi angka pengangguran di Kabupaten Karawang dapat tercapai secara lebih optimal.
2. Dinas Tenaga Kerja diharapkan dapat meningkatkan kegiatan sosialisasi mengenai sistem informasi lowongan kerja berbasis digital kepada masyarakat. Sosialisasi ini perlu dilakukan secara lebih luas agar masyarakat

mengetahui keberadaan website informasi lowongan kerja dan dapat memanfaatkannya dalam mencari pekerjaan.

B. Saran untuk mengatasi Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Perluasan Kesempatan Kerja di Kabupaten Karawang

1. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Karawang juga diharapkan dapat memberikan pendampingan kepada masyarakat yang masih mengalami kesulitan dalam menggunakan sistem digital, khususnya bagi masyarakat yang kurang terbiasa dengan teknologi. Dengan adanya pendampingan tersebut, diharapkan masyarakat dapat lebih mudah mengakses informasi lowongan kerja yang tersedia.
2. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Karawang diharapkan dapat terus mempertahankan kualitas pelayanan yang sudah berjalan dengan baik, terutama dalam hal kedisiplinan aparatur serta pelayanan kepada masyarakat pencari kerja. Hal ini penting agar pelayanan yang diberikan tetap berjalan secara tertib dan memberikan kenyamanan bagi masyarakat.
3. Pemerintah daerah Kabupaten Karawang juga perlu terus mendukung pelaksanaan program perluasan kesempatan kerja melalui pengelolaan anggaran yang baik sehingga berbagai kegiatan seperti sosialisasi, kunjungan ke perusahaan, maupun kegiatan job fair dapat terus dilaksanakan secara berkelanjutan.